

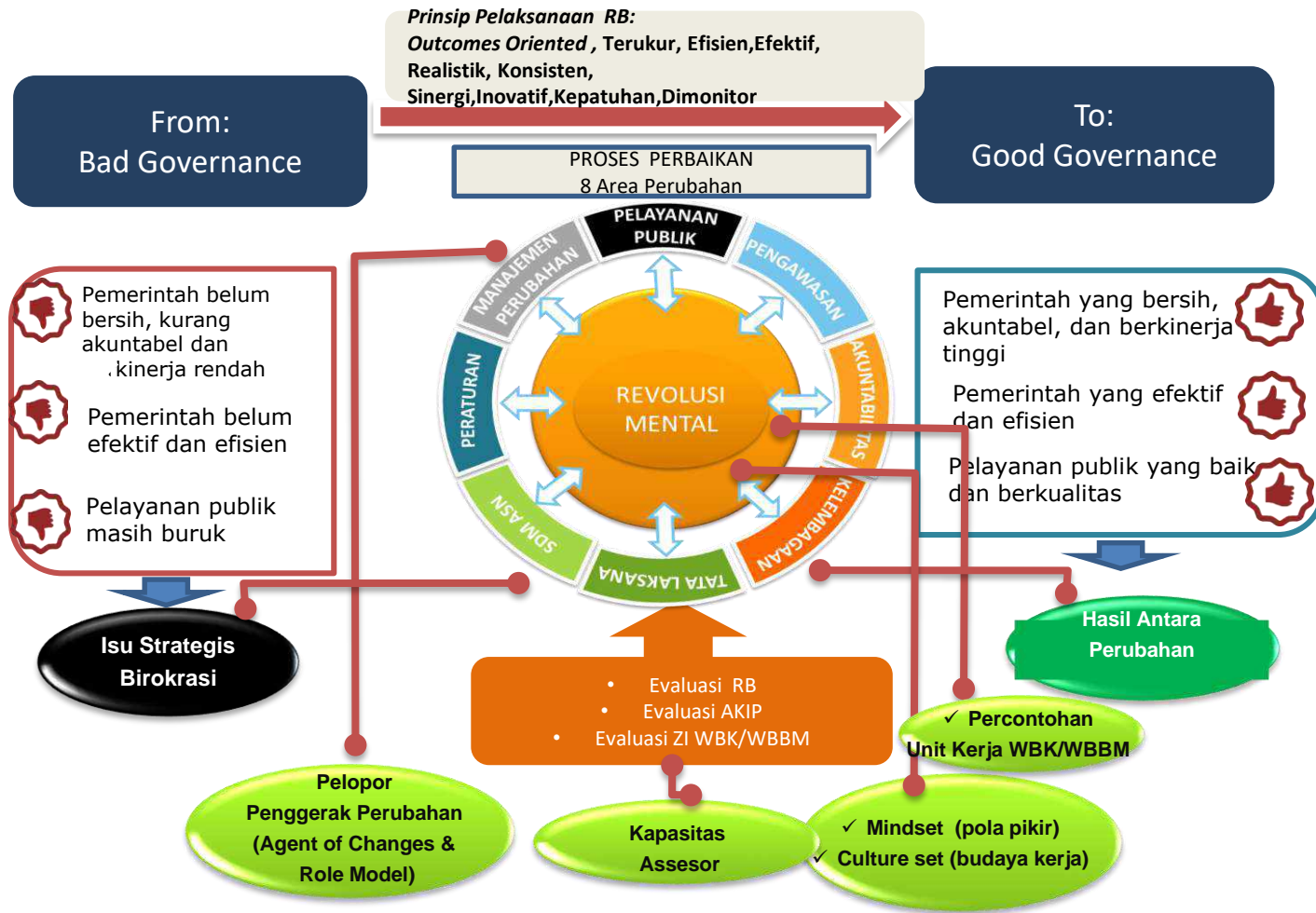
“MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU PEMERINTAH BERSIH DAN MELAYANI”

**Disampaikan pada
Larwasda Kota Magelang**



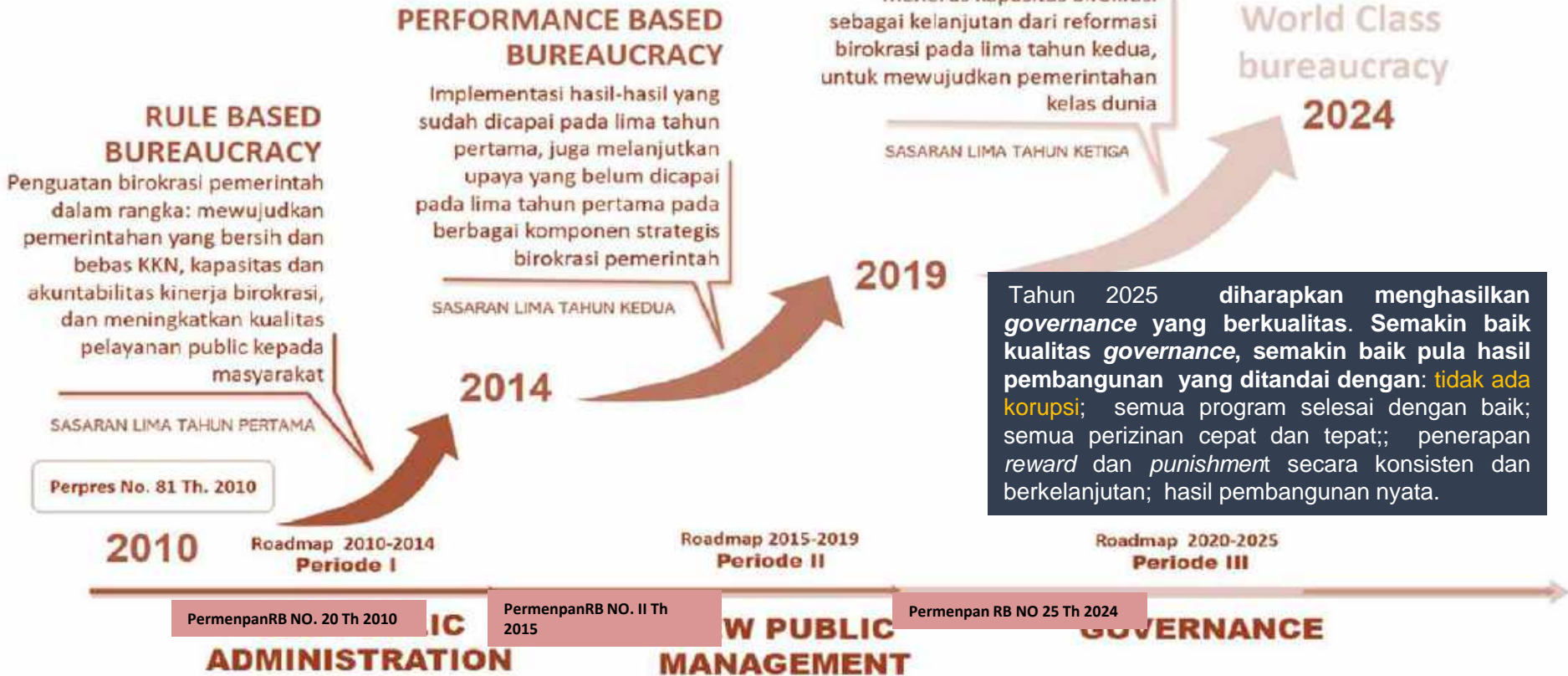
INPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA MAGELANG, 2 DESEMBER 2021

Kerangka pelaksanaan Reformasi birokrasi



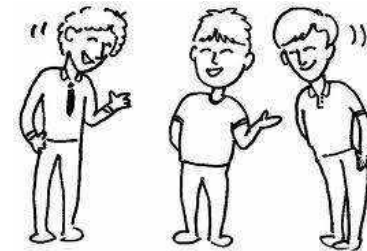
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI

HASIL /KINERJA YANG AKAN DICAPAI





Indeks persepsi korupsi
Indonesia Th 2020 skor 37
Urutan 102 dari 180
Negara



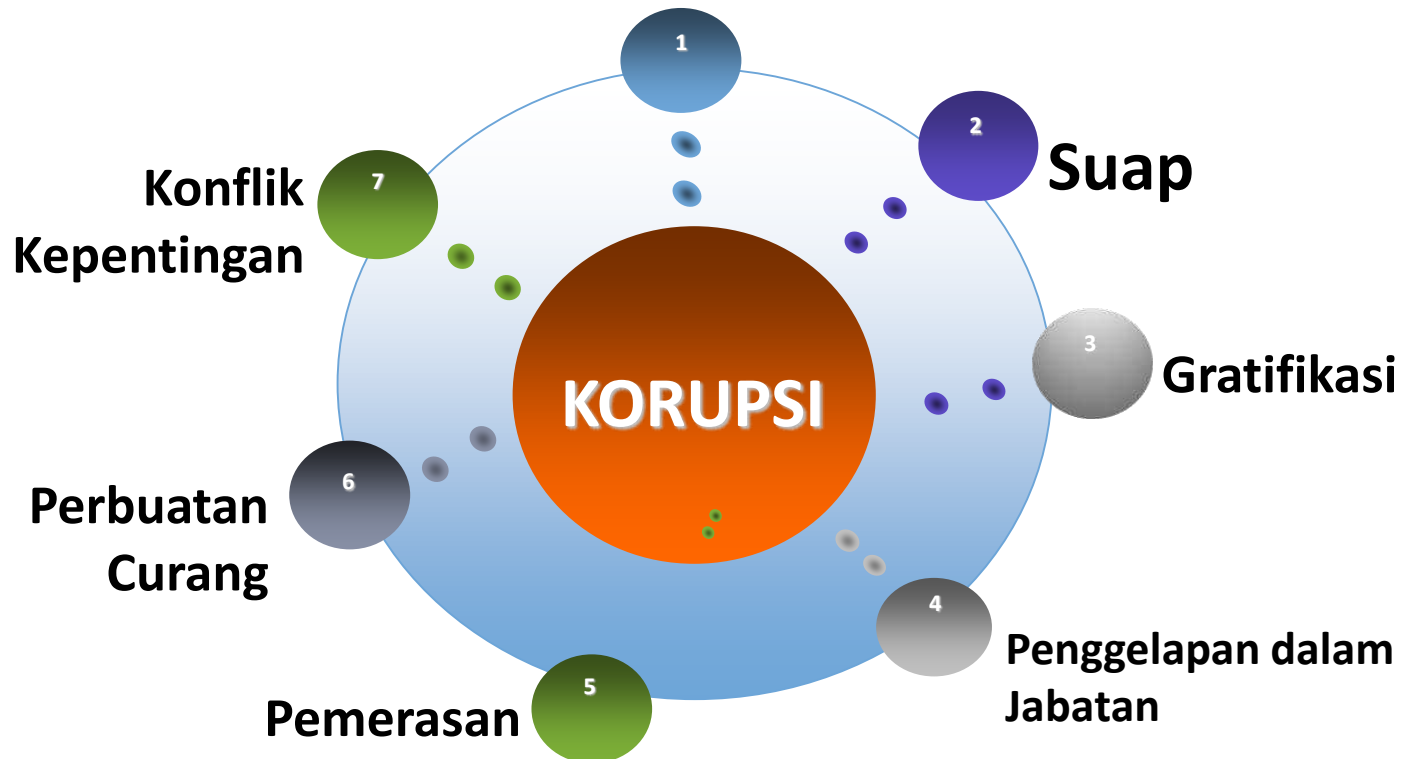
PENGERTIAN KORUPSI

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Yh 2001 tentang TPK “Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

7 (TUJUH) KLASIFIKASI KORUPSI

(UU 31/1999 jo UU 20/2001)

Merugikan Keuangan Negara



FAKTOR TERJADINYA KORUPSI

TEORI “**GONE**” – JOHN BOLOGNA

G – GREED (Keserakahan)



O – OPPORTUNITY (Kesempatan)



N – NEED (Kebutuhan)

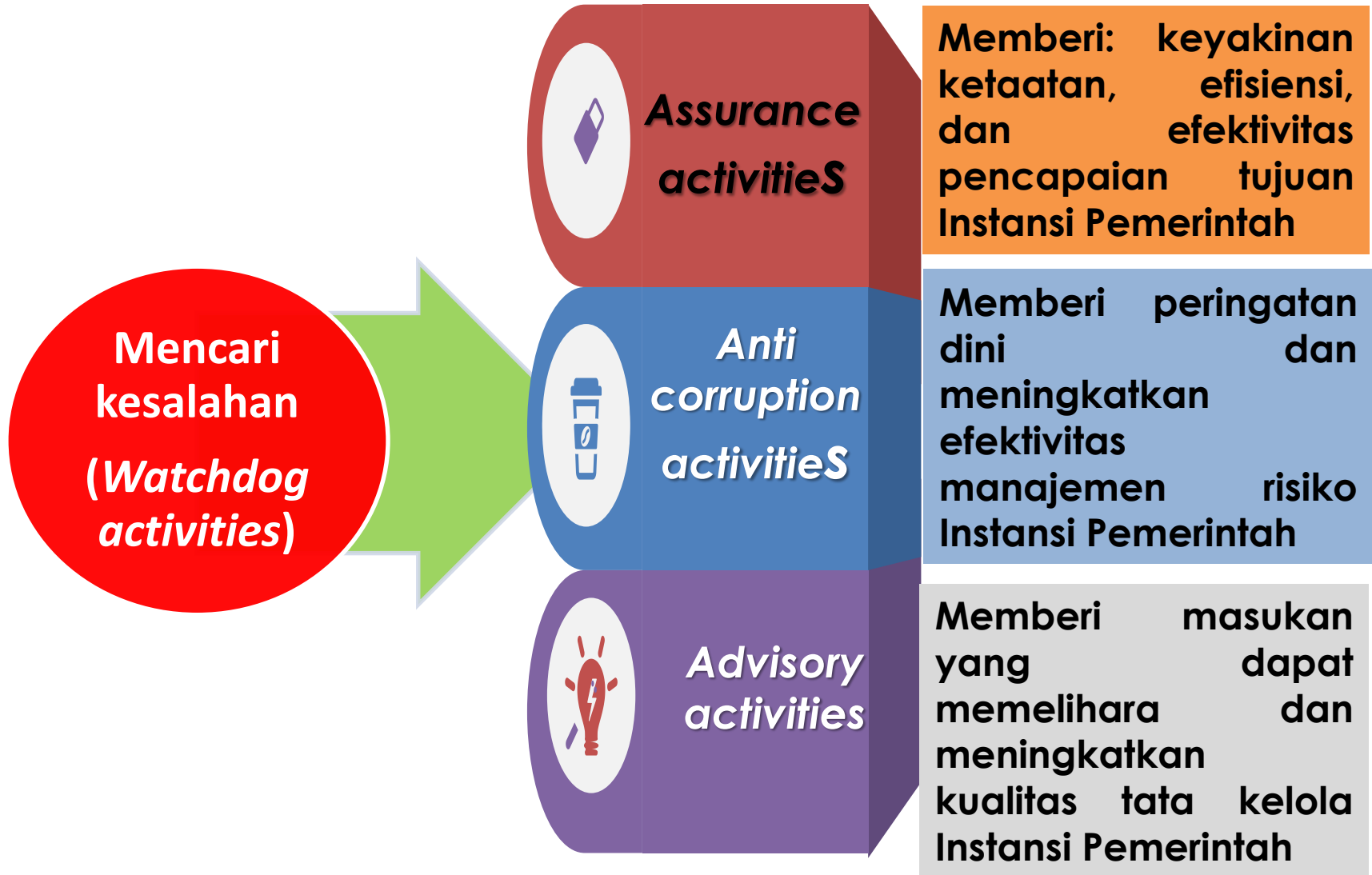


E- EXPOSURE (Pengungkapan)

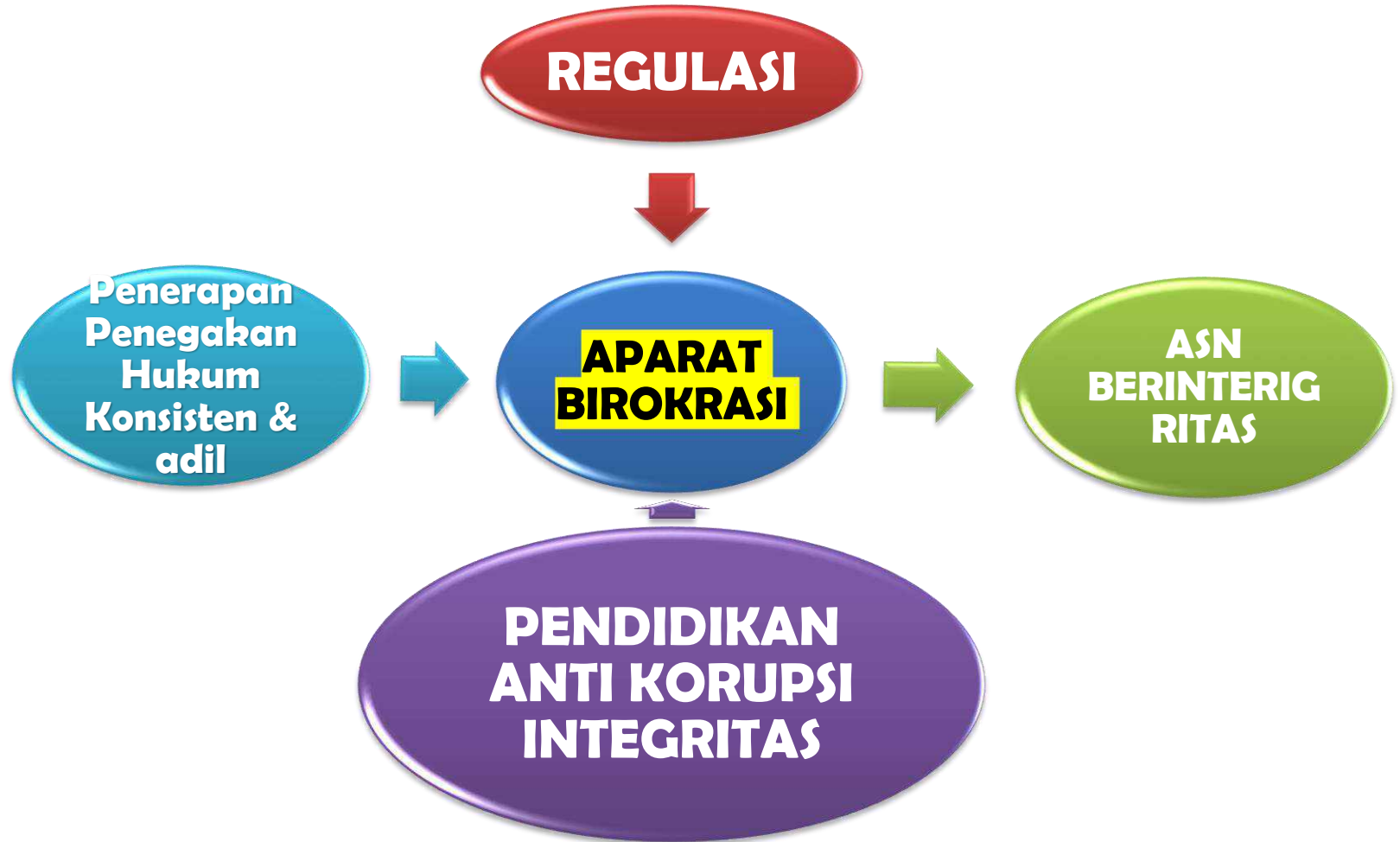


Perubahan Peran APIP

(PP NO 60 TH 2008 TTG SPIP & STANDAR AUDIT AAIPI)



UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI



Implementasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Prov. Jateng



Komitmen Kepala Daerah
 Tagline ***TETEP MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUS***

Kebijakan Daerah Pro Cegah Korupsi

Penguatan Peran APIP

Peningkatan Kapabilitas APIP

- Pendidikan Anti Korupsi bg Pelajar & ASN
- Pembangunan Integritas bg ASN
- PNS sbg Penyuluh Anti Korupsi (PAK)

- Kewajiban LHKPN bg Pejabat
- Kewajiban LHKASN bg PNS Non Wajib LHKPN
- Pengendalian Gratifikasi
- Optimalisasi kanal2 aduan (LaporGub, twitter, dsb)



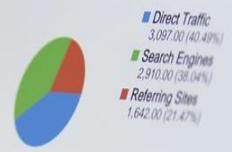
- Integrasi sistem e-budgeting sd e-kinerja
- Perbaikan Sistem Layanan Publik di OPD
- Penerapan SPIP & Mitigasi Resiko di OPD
- Kolaborasi Cegah Korupsi antara APIP & KPK RI
- Kolaborasi APIP, APH & BPKP dlm pengawalan prog penanganan Covid-19
- Penerapan Transaksi Non Tunai;
- **Pembangunan Zona Integritas bagi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik menuju WBK/WBBM**

- Audit Investigasi;
- Audit Tujuan Tertentu;
- Pengenaan sanksi hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar tipikor;
- Melimpahkan kasus indikasi Tipikor ke APH;
- Recovery asset hasil korupsi.





Traffic Sources Overview



Visitors Overview



HUBUNGAN INTEGRITAS DAN KORUPSI

INTEGRITAS

VS

KORUPSI



ANTI-KORUPSI = INTEGRITAS

(Semua sikap/tindakan menghindari, melawan, memberantas, mencegah korupsi, spt: konsisten pada aturan, berani bersaksi dsb.)

SUMPAH JABATAN

(Perka BKN NO.7 Th 2017)

Demi Allah saya bersumpah:

Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung **etika** jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya,dan penuh tanggungjawab.

Bahwa saya, aka menjaga **integritas**, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindari diri dari perbuatan tercela

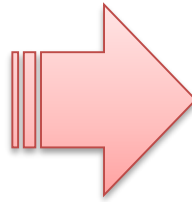
Integritas

Keselarasan antara pikiran, perkataan, perbuatan dengan standar norma/nilai/hukum yang berlaku, [KPK, 2021]

Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. (Lampiran II Permenpan RB 38/2017)



INTEGRITY



KESESUAIAN

antara hati, pikiran, dan perbuatan.

9 Nilai INTEGRITAS

Jujur Peduli Mandiri Disiplin

Tanggung Jawab Kerja Keras

Sederhana Berani Adil

JUPEMANDI TANGKER SEBEDIL

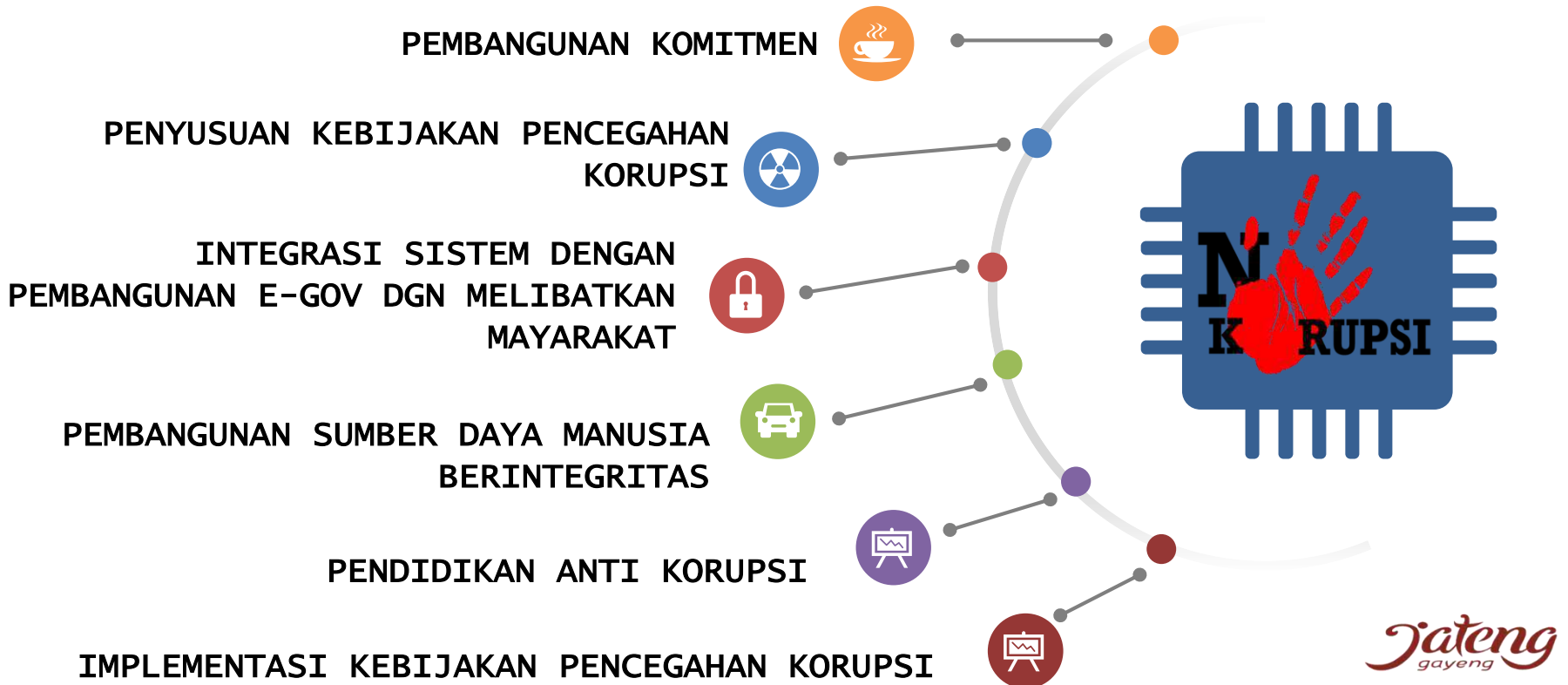
PERILAKU TIDAK BERINTEGRITAS

1. Korupsi dengan segala bentuk strata dan manifestasinya
2. Berbohong, dusta, tidak jujur
3. Ingkar, tidak tepat janji
4. Tidak disiplin
5. Pura-pura, tidak tulus
6. Khianat, tidak amanah, tidak menyampaikan
7. Perbuatan tercela lain spt penggunaan fasilitas bukan untuk/pada peruntukannya, kendaraan dinas dan transport, charging cellphone, dll

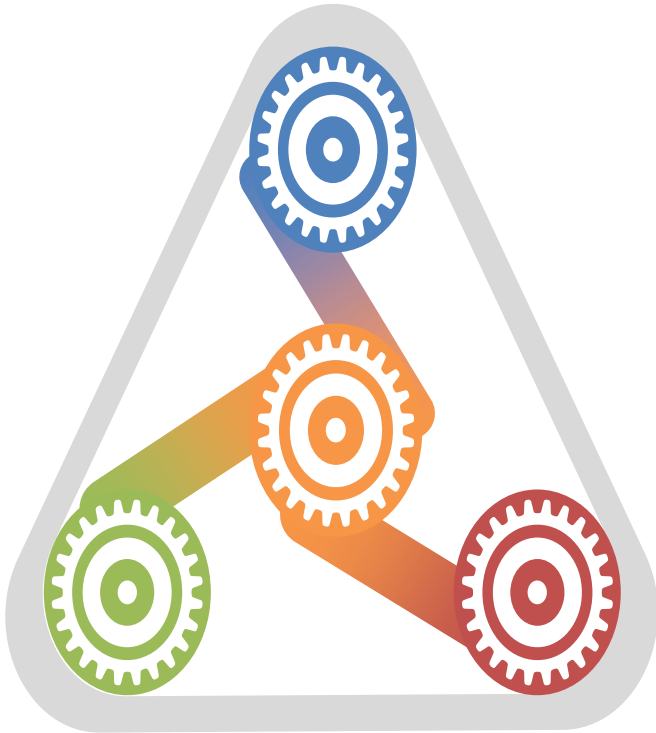
LEVEL INTEGRITAS DALAM BEKERJA



UPAYA BANGUN INTEGRITAS JATENG



PEMBANGUNAN KOMITMEN PEMBANGUNAN INTEGRITAS



Tagline **"TETEP MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUS"**

Komitmen Pencanangan **Zona Integritas** bersama Menpan-RB bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah tahun 2014

Penandatanganan Komitmen **Pakta Integritas** antara Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah serta seluruh Kepala SKPD beserta Direksi BUMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2015

Penandatanganan Komitmen **Pakta Integritas** antara Gubernur dan seluruh Kepala SKPD serta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah tahun 2015

Transparansi Kekayaan Pejabat/PNS Melalui Pelaporan LHKPN/LHKASN

Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi oleh seluruh Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah

PROSES PEMBANGUNAN

PENCANANGAN ZI

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
- Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas

PEMBANGUNAN ZI

- Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
- Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

PENGUSULAN

- Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
- TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
- Pengusulan ke Kemen PAN RB

Reviu TPN

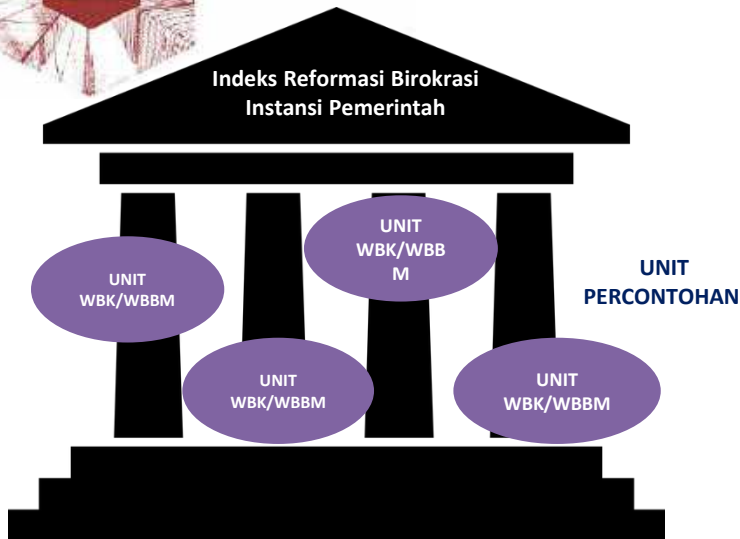
- Reviu oleh Tim Penilai Nasional


Penetapan WBK/WBBM

- MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
- MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM

HAKEKAT

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM



 Mandatory
(Stranas PK)

 Mandiri
Prioritas K/L/P)

- Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia

- Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi/integritas tinggi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas

- Membangun percontohan (*Role Model*) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

INTEGRITY

IS DOING THE
RIGHT THING.

EVEN WHEN
NO ONE IS
WATCHING.

©A. Lewis

Perilaku Membangun Budaya

mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

BUDAYA INTEGRITAS

Kejujuran

Perilaku yang menunjukkan kebenaran sesuai apa adanya

Komitmen

Perilaku yang menunjukkan keinginan secara terus menerus menunjukkan kebenaran

Konsistensi

Perilaku yang menunjukkan kesetiaan terhadap kebenaran

Etis (Ethical)

Perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku

Bebas dari kepentingan

Perilaku yang selalu menghindari konflik kepentingan dan pengaruh politik

Penuh tanggungjawab

Perilaku yang selalu menunjukkan bekerja dengan penuh tanggungjawab

Adil

Perilaku yang selalu memberikan perlakuan yang sama

Menghormati

Perilaku yang selalu memberikan penghormatan kepada setiap orang



BUDAYA MELAYANI



merespon
cepat



disiplin



tidak segan
mengucapkan
maaf atau terima
kasih



senyum



tulus



menawarkan solusi



ramah



membantu



mendengar



fokus



sabar,
mampu
meredam
emosi



menghormati



peka



dapat
dipercaya

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS STRATEGI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

Kriteria



Unit WBK: Unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Refomasi Birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik.



Unit WBBM: Unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Refomasi Birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik, **serta telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.**



Kawasan WBK/WBBM: Kawasan yang seluruh unit kerja yang ada didalamnya berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, kinerja yang baik dan terdapat keterpaduan /integrasi proses bisnis layanan antar unit kerja.

1

Komitmen dan budaya kerja yang anti korupsi dan melayani publik.

2

Manajemen internal yang efektif, efisien dan transparan.

3

Profesionalisme pengelolaan SDM

4

Akuntabilitas kinerja organisasi dan individu.

5

Sistem pengawasan internal mampu meningkatkan kepatuhan dan menurunkan penyalahgunaan wewenang.

6

Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau serta kemudahan akses pengaduan.

7

Hasil survey terhadap persepsi anti korupsi (IPAK) minimal 90%, dan persepsi kualitas pelayanan publik (IPP) minimal 80% dan 90%

8

Keterpaduan proses bisnis dan integrasi sistem layanan antar unit kerja dalam ada di kawasan.

IMPLEMENTASI WILAYAH BEBAS DARI KOURSİ



tidak melakukan persekongkolan / kolusi dengan penyedia barang / jasa atau para pihak



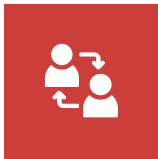
tidak memperoleh *kickback*



tidak mengandung unsur penyuaipan



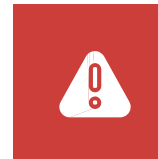
tidak mengandung unsur gratifikasi



tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan



tidak mengandung unsur kecurangan atau mal administrasi



tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat



tidak membiarkan terjadinya TPK

PENGAWASAN PERILAKU FRAUD

Five lines Of Defense

Aparat Penegak Hukum



Masyarakat



Pengawas Eksternal



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



Manajemen



APIP



PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENERIMA PREDIKAT WBK/WBBM OLEH KEMENPAN-RB

WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

1. RSJD Dr.Amino Gondohutomo;
 2. RSJD Surakarta;
 3. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi;
 4. RSUD Kelet;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 6. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I DLHK.
-

WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. Margono Soekarjo;
 2. RSUD Tugurejo;
 3. RSUD Dr. Moewardi .
-

TL LHP



**HASIL
RIK
APIP**

**HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 s.d SEMESTER I TAHUN 2021**

NO	TAHUN	JENIS PEMERIKSAAN	JML TEMUAN	JML REKOMENDASI	REK. SELESAI	REK. DALAM PROSES
1	2021	Rik Akhir Masa Jabatan Walikota	1	9	8	1
Jumlah			1	9	8	1



TERIMA KASIH

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Mawas & Kerja Ikhlas